

PEMULIHAN KRISIS BANGSA (BAGIAN KETIGA DARI TIGA TULISAN)

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam hubungan interaktif antara ketiga unsur kekuasaan — unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif — badan legislatif dituntut untuk benar-benar memenuhi fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Badan legislatif yang berfungsi penuh karena absah melalui pemilihan umum yang bebas, terbuka dan demokratis, merupakan faktor pengimbang dan pengawas kepada keseluruhan proses dan struktur politik yang terjadi, sebagai realisasi dari kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Dan adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukadimah UUD 45, akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat itu. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman. Pemerintahan mana pun akan akhirnya bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman kepada negara, dan dalam keadaan yang sulit itu akan tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota masyarakat luas yang benar-benar berkepentingan kepada keselamatan bangsa dan negara.

Karena itu kedaulatan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang ekonomi. Sesungguhnya, kedaulatan ekonomi inilah yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita dalam bernegara. Sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut-punya, dan rasa ikut-serta oleh semua. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, dibiarkannya praktik-praktik kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan merajalela. Kesalahan dalam politik ekonomi dan pembangunan Orde Baru, sekalipun tidak dapat diramalkan dengan pasti sebelumnya, telah berujung dengan hancurnya kedaulatan rakyat dan negara berhadapan dengan tekanan dunia luar. Sekalipun kerugian akibat kesalahan tersebut menimpa dunia luar yang bersangkutan itu sendiri juga, namun yang paling parah ialah kerugian yang menimpa rakyat, pendiri, pembentuk dan pemilik negara yang sebenarnya.

Pada titik ini ide reformasi membentuk lingkaran penuh dan sempurna. Reformasi itu bertitik-tolak dari komitmen masing-masing pribadi kepada nilai kehidupan yang luhur, dan berakhir dengan komitmen kita semua kepada usaha mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memperhatikan segenap potensi nasional kita, baik dalam artian sumber daya manusia maupun dalam artian sumber daya alam. Kita harus menjadikan potensi-potensi nyata itu sebagai modal dan pangkal pembangunan ekonomi rakyat patriotik. Pembangunan ekonomi nasional harus diubah arahnya sedemikian rupa sehingga lebih berpijak kepada kenyataan-kenyataan nasional kita yang sebenarnya, dan tidak mengembara mengikuti gelombang fantasi, khayal dan iming-iming dunia luar, yang ternyata telah berakhir dengan ancaman kedaulatan kita.

Ketangguhan ekonomi rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreativitas setinggi-tingginya. Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan andalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. Dalam sistem ekonomi global — suatu hal yang tidak dapat dihindari — hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak mana pun juga. Dan dengan ketangguhan ekonomi nasional itu pula, kita akan lebih terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional.

Mengakhiri rentetan ini, ada baiknya kita merefleksikan juga mengenai arti Pancasila dalam keseluruhan yang sudah kita lihat. Pancasila adalah sebuah ideologi modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tapi juga lebih-lebih lagi karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Masyarakat Indonesia.

Sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka. Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia, juga merupakan hal yang final (untuk meminjam ungkapan Kiai Haji Ahmad Shiddiq, mantan Ra'is Amm Nahdlatul 'Ulama (NU). Namun dari segi pengembangan prinsip-prinsipnya sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa lain kecuali mesti dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oleh karena itu tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (*once for all*). Pancasila juga tidak

mengizinkan adanya badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya. Otoriterianisme dalam sejarah selalu dimulai oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengaku sebagai pemegang kewenangan tunggal di suatu bidang yang menguasai kehidupan orang banyak, khususnya bidang ideologi politik.

Kemestian logis akibat deretan argumen itu ialah bahwa masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional itu, dan mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk, tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik-tolak pengembangan pola hidup bersama. Jadi Pancasila memang harus menjadi ideologi terbuka, sesuai dengan rancangannya untuk landasan kehidupan sosial-politik Indonesia yang plural dan modern.

Suatu fase kemantapan nasional amat penting telah terjadi di negeri kita berkenaan dengan kefinalan Pancasila ini, yaitu diterimanya ideologi itu sebagai asas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks pluralisme dan keterbukaan. Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka, itu berarti ia tidak memberikan penafsiran secara detail dan nyata “sekali untuk selamanya”, tanpa bisa diubah-ubah. Jadi ia tidak mengizinkan adanya indoktrinasi — yang telah diperlihatkan contohnya dalam negeri-negeri komunis sebagai kegagalan total, maupun di masa Orde Lama dan Orde Baru. [❖]